Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6605-6616

KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI DISTRIBUSI PANGAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERATAAN EKONOMI PANGAN DAN BUDAYA TOLERANSI PERDAMAIAN DI INDONESIA

Rufaidah Zafira[1] Rizqiana Khalida[2] Rizal Maulana[3]
IAI Al-Azis1[23]
Email: rufaidah976@gmail.com[1], rizqianakhalida60@gmail.com[2] rizal@iai-alzaytun.ac.id[3]

Abstrak
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan Indonesia periode 2019–2024 menunjukkan peningkatan, masih terdapat ketimpangan distribusi pangan antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur yang berdampak pada akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap munculnya malnutrisi ganda, yaitu terjadinya kekurangan gizi dan kelebihan gizi secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan diversifikasi distribusi pangan dalam perspektif hukum nasional serta relevansinya terhadap ketahanan pangan, keadilan distributif, integrasi sosial, dan toleransi budaya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi distribusi pangan merupakan strategi yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk memperkuat akses pangan yang adil dan berkelanjutan. Selain mendukung peningkatan kualitas gizi dan pengurangan ketergantungan pada beras, pengembangan pangan lokal juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah, pelestarian budaya pangan, serta peningkatan integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, diversifikasi distribusi pangan perlu dipandang sebagai instrumen ketahanan pangan sekaligus sarana mewujudkan keadilan sosial dan harmoni budaya di Indonesia.
Kata Kunci: Kata Kunci: *diversifikasi pangan; distribusi pangan; ketahanan pangan; keadilan distributif; toleransi budaya.*

Abstract
Food is a basic human necessity that plays a strategic role in ensuring national resilience, public health, and social stability. Although Indonesia's Food Security Index showed improvement during the 2019–2024 period, disparities in food distribution between western and eastern regions remain significant, affecting public access to nutritious food. This condition contributes to the phenomenon of the double burden of malnutrition, where undernutrition and overnutrition coexist within the same population. This study aims to analyze food distribution diversification policies from the perspective of national law and their relevance to food security, distributive justice, social integration, and cultural tolerance. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate that food distribution diversification is consistent with the mandate of Law Number 18 of 2012 on Food, which seeks to strengthen equitable and sustainable access to food. In addition to improving nutritional quality and reducing dependence on rice, the development of local food resources contributes to regional economic growth, preservation of food culture, and enhancement of

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6605-6616

social integration within Indonesia's multicultural society. Therefore, food distribution diversification should be viewed not only as a food security strategy but also as an instrument for achieving social justice and cultural harmony in Indonesia.
Keywords: *food diversification; food distribution; food security; distributive justice; cultural tolerance.*

A. Pendahuluan

Pangan merupakan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup, kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas sosial suatu negara. Dalam konteks Indonesia, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut distribusi, aksesibilitas, kualitas gizi, dan pemerataan konsumsi masyarakat. Ketimpangan distribusi pangan yang terjadi di berbagai daerah telah menimbulkan fenomena *malnutrisi ganda* (*double burden of malnutrition*), yaitu kondisi ketika masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam satu populasi. Di satu sisi masih ditemukan kasus stunting, wasting, dan kekurangan energi kronis, sedangkan di sisi lain meningkat angka obesitas dan penyakit degeneratif akibat pola konsumsi pangan yang tidak seimbang [1].

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem distribusi pangan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan akses terhadap pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Ketergantungan masyarakat terhadap jenis pangan tertentu, terutama beras, juga mempersempit variasi konsumsi pangan dan berdampak pada rendahnya diversifikasi gizi masyarakat. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber pangan lokal yang sangat beragam, seperti jagung, sagu, singkong, umbi-umbian, dan berbagai komoditas lokal lainnya yang tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya pangan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi konsumsi pangan yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakatnya, sehingga pengembangan pangan lokal juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap keberagaman budaya dan penguatan toleransi antarbudaya dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas pangan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan dan percepatan penurunan stunting. Namun demikian, implementasi kebijakan distribusi pangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan infrastruktur, disparitas harga antarwilayah, lemahnya pengawasan distribusi, serta dominasi rantai pasok oleh kelompok tertentu yang dapat memengaruhi keadilan distribusi pangan [2].

Oleh karena itu, kebijakan diversifikasi distribusi pangan menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat untuk menciptakan sistem pangan yang adil, merata, berkelanjutan, serta inklusif terhadap keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan ini tidak

[1] Rian Diana and Ikeu Tanziha, "Double-Duty Actions to Reduce the Double Burden of Malnutrition in Indonesia," *Amerta Nutrition* 4, no. 4 (2020): 326, https://doi.org/10.2473/amnt.v4i4.2020. 326-334.
[2] Merry Viona et al., "Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Di Indonesia: Peran Negara Dalam Menghadapi Krisis Pangan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025), https://doi.org/10.5281zenodo.15613605.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6605-6616

hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi, tetapi juga memperkuat integrasi sosial melalui pengakuan dan pelestarian nilai-nilai budaya pangan lokal di setiap daerah. Dalam konteks yang lebih luas, ketimpangan distribusi pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas dan perdamaian sosial, karena dapat memicu kesenjangan sosial, konflik ekonomi, peningkatan kemiskinan, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan negara. Dengan demikian, pangan tidak hanya dipahami sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga harmoni sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian kebijakan diversifikasi distribusi pangan tidak hanya dari aspek ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dari perspektif perdamaian sosial dan budaya toleransi. Penelitian mengenai pangan pada umumnya lebih banyak membahas persoalan gizi dan ekonomi saja, sedangkan kajian yang menghubungkan distribusi pangan dengan stabilitas sosial dan toleransi budaya masih relatif terbatas.

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif yang menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pangan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan distribusi pangan dan perlindungan hak masyarakat atas pangan yang layak.

B. Metode Penelitian

Menggambarkan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan ketahanan pangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kebijakan diversifikasi distribusi pangan dalam perspektif ketahanan pangan, keadilan distributif, serta integrasi sosial dan toleransi budaya di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

HASIL

1. Kondisi Ketahanan dan Distribusi Pangan di Indonesia

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indonesia tahun 2019–2024, secara umum terjadi peningkatan nilai IKP di sebagian besar provinsi. Pada tahun 2019, beberapa wilayah seperti Papua (25,13), Papua Barat (30,12), dan Nusa Tenggara Timur (50,69) menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang rendah dan termasuk kategori rentan hingga sangat rentan. Sebaliknya, provinsi seperti Bali (85,15), DI Yogyakarta (83,63), dan Jawa Tengah (78,85) berada pada kategori sangat tahan pangan.

Pada periode 2020–2022, terjadi peningkatan relatif pada hampir seluruh provinsi,

termasuk wilayah Indonesia Timur. Misalnya, Papua meningkat dari 34,79 (2020) menjadi 37,8 (2022), sementara Papua Barat meningkat dari 49,4 menjadi 45,92 pada periode yang sama, meskipun masih berada pada kategori rentan. Wilayah dengan kategori sangat tahan seperti Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan konsistensi nilai IKP di atas 80.

Pada tahun 2023–2024, tren peningkatan ketahanan pangan nasional semakin terlihat dengan meningkatnya nilai IKP di hampir seluruh provinsi. Bali mencapai 88,23 (2024), DI Yogyakarta 84,15, Jawa Tengah 85,34, dan DKI Jakarta 85,13, yang menunjukkan stabilitas ketahanan pangan pada kategori sangat tahan. Namun demikian, ketimpangan masih terlihat pada wilayah Papua (40,21 pada 2024) dan Papua Barat (51,36), yang tetap berada pada kategori rentan hingga agak rentan.

Secara spasial, data menunjukkan adanya disparitas ketahanan pangan antara wilayah Indonesia Barat dan Timur. Wilayah barat seperti Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera cenderung memiliki indeks ketahanan pangan yang lebih tinggi dan stabil, sedangkan wilayah timur masih menunjukkan kerentanan struktural. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pangan nasional belum sepenuhnya merata, terutama dalam aspek aksesibilitas dan keterjangkauan pangan antarwilayah.

2. Kondisi Sosial-Budaya dan Keragaman Pangan Lokal di Indonesia

Budaya pangan meliputi konsep yang berkaitan dengan perjalanan makanan, masakan, dan sistem pangan. Selain itu, ia juga mencakup sebuah pemahaman dasar yang dimiliki suatu kelompok tentang makanan, kondisi kekinian, historis yang membentuk hubungan kelompok tersebut dan cara kelompok tersebut menggunakan makanan. Hal ini yang menyebabkan budaya pangan bukanlah sesuatu yang statis melainkan terus berubah mengikuti keadaan. Sebagai ilustrasi, adanya perubahan sosial, yaitu ibu rumah tangga banyak bekerja di luar rumah, mengakibatkan waktu untuk menyiapkan makanan menjadi lebih terbatas [3]. Untuk masyarakat NTT yang memiliki pangan pokok jagung akan beralih atau mengganti sebagian menu makannya dengan pangan yang lebih praktis, misalnya mi instan karena mengolah nasi jagung memerlukan waktu yang lama. Selain budaya, inovasi teknologi olahan produk juga memengaruhi perkembangan pangan. Kurangnya inovasi teknologi dapat membuat masyarakat kurang minat terhadap produk lokal tersebut [4].

Padahal bahan pangan lokal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia berbeda di tiap wilayahnya sehingga menciptakan ciri khas tersendiri. Heterogenitas bahan pangan lokal Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang beragam di negara ini. Keunikan ini juga menjadi bagian penting dari warisan kuliner Indonesia yang beragam dan menarik. Terwujudnya diversifikasi pangan di masyarakat memerlukan upaya yang kompleks dan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, petani, produsen pangan, dan konsumen. Ketika diversifikasi terwujud, harapan selanjutnya yaitu tercapainya pola makan yang lebih sehat, beragam, dan berkelanjutan di masyarakat.

---

[3] S. Suharko, "Mempertahankan Budaya Pangan Lokal Berbasis Jagung: Studi Kasus Di Desa Pagerejo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 7, no. 1 (2019): 57–64, https://doi.org/https://doi. org/10.22500/sodality.v7i1.25458.

[4] I. Ikhram, A., & Chotimah, "Pemberdayaan Masyarakat Diversifikasi Pangan Masyarakat Melalui Inovasi Pangan Lokal Dari Singkong," *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 271–278., https://doi.org/10.32832/abdidos.v6i1.1217.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6605-6616

Indonesia memiliki sumber daya laut, beragam jenis ikan, dan produk perikanan lokal yang melimpah. Setiap daerah pesisir memiliki jenis produk olahan ikan yang khas disebabkan cara pengolahan dan tradisi budi daya atau pemeliharaan yang berbeda. Misalnya, bandeng presto dari Semarang, cakalang fufu dari Manado, ikan tongkol dari Bali, dan udang galah dari Jawa Timur. Selain itu, terdapat produk perikanan lainnya seperti terasi, ikan asin, udang kering, kerang, cumi-cumi, dan makanan laut lainnya yang digunakan dalam berbagai hidangan. Karena beragamnya rempah dan bahan pangan yang ada, setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang unik. Misalnya, rendang dari Padang, gudeg dari Yogyakarta, pempek dari Palembang, dan bika ambon dari Medan, nasi boranan dari Lamongan, dan lontong balap dari Surabaya, Jawa Timur. Masing- masing makanan tradisional ini memiliki perbedaan resep, bahan, dan cara memasak yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Selain makanan-makanan yang telah disebutkan, kue dari bahan pangan lokal juga sangat beragam, misalnya, kue lapis dari Lampung, klepon dari Sidoarjo, tape Situbondo, kue apem dari Sumatra, onde-onde dari Mojokerto dan Betawi, brem dari Madiun. Setiap kue memiliki rasa, tekstur, dan bahan-bahan yang unik.

Beberapa agroindustri pengolahan ubi kayu sudah berkembang cukup lama di Provinsi Lampung, di antaranya adalah agroindustri bihun tapioka dan beras siger. Meskipun bahan bakunya berbeda, bahan baku tersebut berasal dari bahan dasar yang sama, yaitu ubi kayu. Bahan baku bihun tapioka adalah tepung tapioka, sedangkan bahan baku beras siger adalah ubi kayu/singkong segar, Beras siger (singkong seger) merupakan produk beras analog berbahan baku singkong segar [5]. Berbagai jenis pangan olahan berbasis singkong diproduksi di Provinsi Lampung. Jenis olahan tersebut antara lain singkong goreng dan rebus, tiwul atau beras siger, bihun tapioka, dan opak singkong. Di antara beberapa jenis olahan tersebut, jenis olahan yang seringdikonsumsi adalah singkong goreng dan rebus [6].

Penelitian oleh [7] menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi pangan lokal olahan berbasis singkong di masyarakat berhubungan dengan adanya budaya makan pangan tertentu. Tiwul memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan suku Jawa. Makanan ini telah menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi kuliner suku Jawa selama bertahun-tahun. Tiwul tidak hanya sebagai sumber karbohidrat dari pangan lokal, tetapi juga memiliki nilai budaya. Pembuatan tiwul merupakan tradisi turun-temurun yang diajarkan dari generasi ke generasi. Hal ini mencerminkan kearifan lokal dan identitas budaya suku Jawa. Tiwul sering diolah dan dikonsumsi dalam acara-acara sosial atau upacara adat suku Jawa, seperti selamatan/*slametan* atau kenduri. Makanan ini menjadi simbol keramahtamahan dan kebersamaan dalam berbagi makanan dengan keluarga, tetangga, atau komunitas. Konsumsi tiwul juga dapat memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan antaranggota suku Jawa. Secara garis besar, tiwul memiliki peran yang penting dalam kehidupan suku Jawa sebagai sumber pangan, warisan budaya, simbol seni, penghubung sosial, dan potensi pariwisata. Makanan ini memperkaya identitas budaya suku Jawa dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Mengonsumsi tiwul bagi kelompok etnis Jawa merupakan kebiasaan masa lalu ketika ketersediaan beras di masyarakat belum tinggi.

[5] (Syahpura, 2019)
[6] (Sayekti, Lestari, & Ismono, 2020)
[7] Syafani, Lestari, & Sayekti, (2015)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6605-6616

Dahulu sebagian wilayah di Indonesia mempunyai pangan lokal sebagai makanan pokok masyarakatnya terutama di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Masyarakat Madura dengan jagungnya, Maluku dengan sagu, serta Papua dengan sagu dan ubi jalarnya. Menurut [8], pertanian sagu di Maluku merupakan "*way of life*" dan dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan, pemasok pangan sumber karbohidrat utama pada tempo dulu. Namun, peran sagu tersebut mulai menurun dan digantikan dengan beras.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Diversifikasi Distribusi Pangan dalam Kerangka Hukum Nasional

Kebijakan diversifikasi distribusi pangan dalam kerangka hukum nasional merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya pangan dalam jumlah cukup, tetapi juga mencakup aspek distribusi dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat. Selain itu, kemandirian pangan dimaknai sebagai kemampuan negara dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi pangan menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis pangan tertentu dan memperkuat sistem pangan nasional [9].

Diversifikasi distribusi pangan dilakukan melalui pengembangan potensi pangan lokal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya pangan lokal sebagai alternatif konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal seperti jagung, sagu, singkong, umbi-umbian, dan berbagai komoditas lainnya yang dapat dikembangkan sebagai substitusi bahan pangan utama. Pengembangan pangan lokal tidak hanya bertujuan meningkatkan variasi konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Oleh karena itu, diversifikasi pangan dipandang sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal [10].

Dalam implementasinya, distribusi pangan menjadi salah satu subsistem penting dalam sistem ketahanan pangan nasional selain aspek produksi dan konsumsi pangan. Sistem distribusi pangan yang baik akan menentukan pemerataan akses pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem distribusi pangan yang efektif melalui penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem informasi pangan, dan penguatan kebijakan distribusi berbasis kebutuhan masyarakat. Kebijakan distribusi pangan juga diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh pangan secara cukup, aman, dan terjangkau. Dengan demikian,

[8] Bustaman, & Susanto (2007)

[9] Asep Dedy Sutrisno, "KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (January 2022): 28–42, https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4862.

[10] (Widowati & Nurfitriani, 2023)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6605-6616

distribusi pangan yang merata menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas [11].

Kebijakan diversifikasi pangan juga berkaitan erat dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Selama ini masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap beras sebagai makanan pokok utama. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan apabila terjadi gangguan produksi maupun distribusi beras. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong diversifikasi konsumsi pangan melalui berbagai kebijakan yang mendukung penggunaan pangan lokal. Diversifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan membiasakan masyarakat mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pangan lokal dan penguatan budaya konsumsi pangan berbasis kearifan lokal [12].

Teori keadilan John Rawls memberikan landasan bahwa kebijakan publik harus dirancang dari sudut pandang kepentingan kelompok yang paling rentan. Dalam konteks distribusi pangan di Indonesia, masih adanya kesenjangan ketahanan pangan antara berbagai daerah menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya pangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sebagai kewajaran. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya menjamin ketersediaan pangan secara nasional, tetapi juga harus memastikan bahwa mekanisme distribusinya mampu menjangkau masyarakat yang berada pada kondisi paling kurang beruntung. Diversifikasi distribusi pangan berbasis potensi lokal menjadi salah satu bentuk kebijakan yang sejalan dengan prinsip tersebut karena dapat memperluas akses pangan, mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia [13].

Dalam kerangka hukum nasional, kebijakan diversifikasi distribusi pangan menunjukkan adanya sinergi antara aspek regulasi, pembangunan ekonomi, dan ketahanan sosial masyarakat. Negara berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan pangan sekaligus fasilitator dalam pengembangan sistem distribusi pangan nasional. Penguatan distribusi pangan berbasis diversifikasi menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pangan yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pangan yang cukup, tetapi juga memperoleh pilihan pangan yang beragam sesuai dengan potensi sumber daya lokal di masing-masing daerah [14].

2. Ketimpangan Distribusi Pangan sebagai Determinan Malnutrisi Ganda

Ketimpangan distribusi pangan di Indonesia masih terlihat dari adanya perbedaan pemenuhan hak atas pangan antarwilayah. Penelitian [15] menunjukkan bahwa wilayah Indonesia bagian barat memiliki tingkat pemenuhan pangan yang lebih baik dibandingkan wilayah timur Indonesia. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor ketersediaan pangan, aksesibilitas, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam

[11] Sutrisno, "KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH."
[12] H Zuhry et al., "Diversifikasi Bahan Pangan Sebagai Strategi Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional BSKJI "Post Pandemic Economy Recovery* 2, no. 6 (2022): 49–58.
[13] Abdul Aziz Nasihuddin et al., *Teori Hukum Pancasila*, *Elvaretta Buana, Tasikmalaya* (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024).
[14] (Widowati & Nurfitriani, 2023)
[15] Maulad et al.. (2022)

sektor pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pangan yang belum merata dapat memengaruhi pola konsumsi dan kondisi gizi masyarakat di berbagai daerah.

Selain perbedaan antarwilayah, kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi tingkat akses terhadap pangan bergizi. Wilayah tempat tinggal dan tingkat pengeluaran rumah tangga juga berpengaruh terhadap kerawanan pangan di Indonesia [16]. Rumah tangga di daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi rendah cenderung lebih rentan mengalami keterbatasan akses pangan dibandingkan masyarakat perkotaan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan tempat tinggal turut memengaruhi kualitas konsumsi serta status gizi masyarakat.

Menurut [17], permasalahan malnutrisi ganda di Indonesia muncul akibat ketidakseimbangan pola konsumsi pangan serta adanya perbedaan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya kasus stunting dan kekurangan gizi di beberapa daerah, sementara pada saat yang sama angka overweight dan obesitas juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, akses layanan kesehatan, serta kualitas konsumsi pangan masyarakat yang berbeda di setiap wilayah.

Selain ketimpangan distribusi pangan, pola konsumsi masyarakat juga berpengaruh terhadap terjadinya malnutrisi ganda di Indonesia. Ketergantungan masyarakat pada jenis pangan tertentu menyebabkan konsumsi pangan kurang beragam dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan bergizi akibat distribusi pangan yang belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya masalah gizi berupa kekurangan gizi dan kelebihan gizi secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya diversifikasi pangan serta pemerataan distribusi pangan agar masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pangan yang beragam, bergizi, dan terjangkau [18].

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan distribusi pangan yang merata dan berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur distribusi, penguatan ketahanan pangan di daerah, serta pemanfaatan pangan lokal menjadi langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan. Di samping itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Melalui kebijakan distribusi pangan yang efektif serta penerapan diversifikasi pangan yang optimal, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara lebih adil dan berkelanjutan [19].

3. Analisis Diversifikasi Distribusi Pangan dalam Integrasi Sosial dan Toleransi Budaya

Diversifikasi distribusi pangan dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik pangan lokal yang berbeda, seperti sorgum dan ubi jalar di Sumatera, singkong dan jagung di Jawa, sagu di Papua dan Kalimantan, serta

[16] Tasya Aguilera and Yogo Aryo Jatmiko, "Pemodelan Tingkat Kerawanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 2021 Dengan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal," *Indonesian Journal of Applied Statistics* 5, no. 2 (2022): 90–108, https://doi.org/https://doi.org/10.13057/ijas.v5i2.65141.

[17] Diana & Tanziha (2020)

[18] Zuhry et al., "Diversifikasi Bahan Pangan Sebagai Strategi Ketahanan Pangan Di Indonesia."

[19] Sutrisno, "KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6605-6616

berbagai jenis kacang-kacangan dan umbi-umbian di Sulawesi dan Maluku. Keanekaragaman pangan lokal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber pangan alternatif yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengembangan pangan lokal tidak hanya berfungsi sebagai alternatif bahan pangan pokok, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi daerah dan memperluas distribusi pangan masyarakat secara lebih merata [20].

Penelitian [21] menjelaskan bahwa diversifikasi pangan lokal dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta karakteristik demografi masyarakat. Pola konsumsi pangan di setiap daerah berkembang sesuai dengan kebiasaan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan diversifikasi pangan lokal dapat menjadi upaya untuk memperkuat integrasi sosial sekaligus menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap keberagaman budaya di Indonesia.

Diversifikasi pangan lokal tidak hanya memiliki peran dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Setiap daerah mempunyai potensi pangan lokal serta pola konsumsi yang berbeda sesuai dengan kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman pangan merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat di berbagai daerah. Keadaan ini mencerminkan adanya keberagaman budaya pangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan sikap saling menghargai antar masyarakat [22].

Diversifikasi pangan lokal merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang tersedia di berbagai wilayah. Pangan lokal di Indonesia memiliki potensi besar dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mengurangi permasalahan kelaparan [23]. Selain itu, pemanfaatan pangan lokal mencerminkan keberagaman jenis pangan yang berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan dan potensi masing-masing daerah. Oleh karena itu, diversifikasi pangan lokal dapat menjadi strategi penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Diversifikasi pangan dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan pangan lokal yang tersedia di masyarakat [24]. Ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis bahan pangan mendorong perlunya pola konsumsi yang lebih beragam. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pangan juga perlu ditingkatkan guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Oleh

---

[20] Sopialena et al., *MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN: STRATEGI UNTUK MASA DEPAN BERKELANJUTAN* (Sumatera Barat: GET PRESS INDONESIA, 2022).

[21] Sudrajat, "Diversifikasi Dan Diferensiasi Konsumsi Pangan Lokal Di Desa Bleberan Playen," *Majalah Geografi Indonesia* 37, no. 2 (2023): 92–103, https://doi.org/10.22146/mgi.70636.

[22] David Sutendi et al., "Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Banyuman," *IDEI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2025): 1–11, https://doi.org/10.38076/ideijeb.v6i1.

[23] Azizatul Ula, "Visi Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal Dalam Mengatasi Kelaparan," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021): 58–64.

[24] Ivonne M. Leiwakabessy et al., "Ketahanan Pangan Melalui Diversifikasi Pangan," *Solideo: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 74–80, https://doi.org/https://doi.org/10.56942/js.v1i2`.93.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6605-6616

karena itu, pemanfaatan pangan lokal dapat menjadi salah satu langkah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemanfaatan pangan lokal dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pengolahan berbagai jenis produk pangan [25]. Pengembangan pangan lokal juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di lingkungan daerah masing-masing. Selain berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, pengolahan pangan lokal dapat membuka peluang usaha yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diversifikasi pangan lokal dapat memberikan manfaat dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus pengembangan ekonomi masyarakat.

Keberagaman pangan lokal di Indonesia menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan budaya pangan yang berbeda-beda. [26] menjelaskan bahwa keunikan pangan lokal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tradisi, serta kebiasaan masyarakat di masing-masing wilayah. Perbedaan tersebut terlihat dari berbagai jenis makanan dan bahan pangan lokal yang berkembang di Indonesia, seperti sagu di Papua, jagung di Nusa Tenggara, hingga berbagai olahan umbi-umbian di Jawa dan Sulawesi. Keanekaragaman pangan lokal tersebut mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Indonesia sekaligus menjadi bagian dari identitas sosial di setiap daerah.

Keanekaragaman pangan lokal yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia mencerminkan adanya perbedaan budaya yang menjadi ciri khas masing-masing masyarakat. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki berbagai tradisi, kebiasaan, dan pola kehidupan yang berbeda di setiap wilayah. [27] menjelaskan bahwa kehidupan dalam masyarakat multikultural memerlukan sikap toleran, keterbukaan, serta penghormatan terhadap keberagaman guna mewujudkan hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, keberagaman pangan lokal dapat dipandang sebagai salah satu kekayaan budaya yang perlu dijaga dan dihargai untuk mendukung terwujudnya integrasi sosial serta penguatan toleransi budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Penutup

Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia pada periode 2019–2024 menunjukkan adanya perbaikan kondisi pangan nasional, namun masih terdapat ketimpangan distribusi pangan antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Ketimpangan tersebut berdampak pada perbedaan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan berkontribusi terhadap munculnya malnutrisi ganda.

Dalam perspektif hukum nasional, diversifikasi distribusi pangan merupakan strategi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkeadilan. Pengembangan pangan lokal tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas gizi dan mengurangi ketergantungan terhadap beras, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah serta melestarikan keberagaman budaya pangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi distribusi

[25] Tanwirul Millati et al., "Diversifikasi Produk Olahan Ubi Alabio Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 741–49, https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6615.

[26] Sri Widowati, *Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*.

[27] Nurul Qhatami Musthafa and Wawan Darmawan, "Penanaman Nilai-Nilai Multikultural Dalam Tradisi Budaya Lokal Di Aceh," *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 11, no. 2 (2024): 219–30, https://doi.org/10.31571/sosial.v11i2.7293.

pangan perlu dipandang tidak hanya sebagai kebijakan ketahanan pangan, melainkan juga sebagai instrumen keadilan distributif, integrasi sosial, dan penguatan toleransi budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aguilera, Tasya, and Yogo Aryo Jatmiko. "Pemodelan Tingkat Kerawanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 2021 Dengan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal." *Indonesian Journal of Applied Statistics* 5, no. 2 (2022): 90–108. https://doi.org/https://doi.org/10.13057/ijas.v5i2.65141.

Bustaman, S., & Susanto, A. N. "Prospek Dan Strategi Pengembangan Sagu Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal Di Provinsi Maluku." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan (JEP)* 15, no. 2 (2007): 169–202.

Diana, Rian, and Ikeu Tanziha. "Double-Duty Actions to Reduce the Double Burden of Malnutrition in Indonesia." *Amerta Nutrition* 4, no. 4 (2020): 326. https://doi.org/10.2473/amnt.v4i4.2020. 326-334.

Ikhram, A., & Chotimah, I. "Pemberdayaan Masyarakat Diversifikasi Pangan Masyarakat Melalui Inovasi Pangan Lokal Dari Singkong." *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 271–278. https://doi.org/10.32832/abdidos.v6i1.1217.

Leiwakabessy, Ivonne M., Melani Manurung, Joni Penda, Dwi Indah Widya Yanti, and Melisa Masengi. "Ketahanan Pangan Melalui Diversifikasi Pangan." *Solideo: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 74–80. https://doi.org/https://doi.org/10.56942/js.v1i2`.93.

Maulad, Akber, Drajat Martianto, and Ikeu Ekayanti. "Evaluation of the Right to Food with Food System Approach at the Provincial Level in Indonesia Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Dengan Pendekatan Sistem Pangan Di Tingkat Provinsi Indonesia." *Amerta Nutrition* 6, no. 2 (2022): 122–29. https://doi.org/10.20473/amnt.v6i2.2022.122-129.

Millati, Tanwirul, Susi, Herliani, and Hemy Sriana. "Diversifikasi Produk Olahan Ubi Alabio Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 741–49. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6615.

Musthafa, Nurul Qhatami, and Wawan Darmawan. "Penanaman Nilai-Nilai Multikultural Dalam Tradisi Budaya Lokal Di Aceh." *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 11, no. 2 (2024): 219–30. https://doi.org/10.31571/sosial.v11i2.7293.

Nasihuddin, Abdul Aziz, Eko Arief Wibowo, Kartika Winkar Setya Sulyanati, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, and Toni Riyamukti. *Teori Hukum Pancasila*. *Elvaretta Buana, Tasikmalaya*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024.

Sayekti, W. D., Lestari, D. A. H., & Ismono, R. H. "Faktor Determinan Konsumsi Pangan Lokal Rumah Tangga Di Provinsi Lampung." *Jurnal Pangan* 29, no. 2 (2020): 87–170. https://doi.org/10.33964/jp.v29i2.469.

Sopialena, Ali Zainal Abidin Alaydrus, Rahadian, Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, Ardiansyah, Andi Suryadi, Indah Sriwahyuni, Mohammad Annas, Suryana, and Titin Eka Setianingsih. *Membangun Ketahanan Pangan: Strategi Untuk Masa Depan Berkelanjutan*. Sumatera Barat: GET PRESS INDONESIA, 2022.

Sri Widowati, Rizki Amalia Nurfitriani. *Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.

Sudrajat. "Diversifikasi Dan Diferensiasi Konsumsi Pangan Lokal Di Desa Bleberan Playen." *Majalah Geografi Indonesia* 37, no. 2 (2023): 92–103.

https://doi.org/10.22146/mgi.70636.

Suharko, S. "Mempertahankan Budaya Pangan Lokal Berbasis Jagung: Studi Kasus Di Desa Pagerejo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 7, no. 1 (2019): 57–64. https://doi.org/https://doi. org/10.22500/sodality.v7i1.25458.

Sutendi, David, Diah Setyorini Gunawan, Muhammad Rifqi, and Dwita Aprillia Floresti. "Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Banyuman." *IDEI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2025): 1–11. https://doi.org/10.38076/ideijeb.v6i1.

Sutrisno, Asep Dedy. "Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (January 2022): 28–42. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4862.

Syafani, T. S., Lestari, D. A. H., & Sayekti, W. D. (2015). "Analisis Daftar Pustaka, Pola Konsumsi, Dan Permintaan Tiwul Oleh Konsumen Rumah Tangga Di Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis (JIIA)* 3, no. 1 (2015): 85–92. https://doi.org/10.23960/jiia.v3i1.1021.

Syahpura, S. K., & Zulfahmi. "Peningkatan Kualitas Beras Siger Berbasis Teknologi ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Dan Halal)." *Media Kontak Tani Ternak* 1, no. 2 (2019): 21–26. https://doi.org/10.24198/mktt.v1i2.24926.

Ula, Azizatul. "Visi Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal Dalam Mengatasi Kelaparan." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021): 58–64.

Viona, Merry, N Nabila, Deva Garcia Katanging, and Mellyana Candra. "Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Di Indonesia: Peran Negara Dalam Menghadapi Krisis Pangan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025). https://doi.org/10.5281zenodo.15613605.

Zuhry, H, A T A Harianja, B Wahyutomo, C N Seirin, D M Gifary, E N Pohan, H Al Aziz, R H Erlangga, and T R S Muhammad. "Diversifikasi Bahan Pangan Sebagai Strategi Ketahanan Pangan Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional BSKJI "Post Pandemic Economy Recovery* 2, no. 6 (2022): 49–58.